



Edisi IV  
Tahun 2020



## Media Komunikasi BPK Perwakilan Provinsi Lampung

Sertijab Kalan



**B**PK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Senin (9/11) menyelenggarakan acara “Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Lampung” yang dihadiri oleh Anggota V BPK RI, Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A.,CIPM.,CSFA.,CPA dan diikuti oleh para pemangku kepentingan di lingkungan Provinsi Lampung antara lain Para Kepala Daerah, Kepala DPRD, dan Unsur Forkompimda serta Pimpinan Instansi Vertikal. Acara sertijab tersebut dilaksanakan secara offline dan online yang bertempat di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Lampung. Sertijab disaksikan oleh Auditor Utama Keuangan V, Akhsanul Khaq, MBA., Ak., CFE., CMA., CPA, CSFA, CA.

Kepala Perwakilan sebelumnya, Hari Wiwoho yang menjabat sejak Juli 2019 digantikan oleh Andri Yogama yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bengkulu. Sekretaris Jenderal BPK telah melantik Andri Yogama sebagai Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Lampung pada tanggal 8 Oktober 2020 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 160/K/X-X.3/10/2020. Hari Wiwoho selanjutnya mengemban tugas baru sebagai Kepala Auditorat IV.B pada Auditorat Keuangan Negara IV.

bersambung ke halaman 2 ...

### Daftar Isi

Halaman 1  
- Sertijab Kalan  
Halaman 2  
- Pembentukan IPKN

Halaman 3  
- Penyerahan LHP Kinerja dan PDDT  
- Kunjungan Kerja DPD RI  
Halaman 4  
- Budaya

Halaman 5  
- Galeri Foto  
Halaman 6  
- Dari Redaksi





lanjutan dari halaman 1

masyarakat saat ini, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dituntut untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangannya. Saat ini, wujud transparansi dan akuntabilitas tersebut, tercermin dalam opini BPK atas penyajian laporan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan juga proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung. Pertanggungjawaban keuangan yang memperoleh opini WTP tersebut akan lebih baik lagi, apabila disertai dengan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, yang diwujudkan dalam bentuk program, kegiatan maupun pelayanan kepada masyarakat.”

Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi yang baru diharapkan mampu memperkokoh keberadaan BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, dan memberikan kontribusi nyata dalam turut mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik, serta dapat terus membina komunikasi yang baik dengan seluruh satuan kerja di Provinsi Lampung. Sedangkan, kepada para pemangku kepentingan BPK di Provinsi Lampung, diharapkan komunikasi dan kerjasama yang telah berlangsung secara baik, dapat terus terpelihara.

Anggota V BPK RI, dalam sambutannya menyampaikan “Sesuai dengan amanah dan mandat konstitusi yang diberikan kepada BPK, BPK akan terus berupaya untuk meningkatkan peran sertanya dalam pembangunan nasional melalui pemeriksaan keuangan negara. Mencermati tuntutan

## Pengurus IPKN Wilayah Lampung Dibentuk

Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab BPK selaku Instansi pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa dalam menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas Jabatan pemeriksa, BPK RI memfasilitasi pembentukan Organisasi Profesi Pemeriksa Keuangan Negara yang diberi nama Institut Pemeriksa Keuangan Negara (IPKN), yang berfungsi sebagai media dalam rangka peningkatan kualitas/kompetensi profesional dan pengembangan profesi pemeriksa.

BPK Perwakilan Provinsi Lampung mengadakan rapat pembentukan IPKN Wilayah Lampung pada Hari Rabu, 12 Agustus 2020. Kegiatan diselenggarakan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Lampung dan dihadiri oleh Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, Inspektorat Provinsi Lampung, Universitas Lampung (Unila) dan para pejabat struktural BPK Perwakilan Provinsi Lampung.

Dalam paparannya Kepala Perwakilan, Hari Wiwoho menjelaskan bahwa latar belakang pembentukan (IPKN) antara lain dengan terbitnya Permenpan RB Nomor 49 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Pasal 38 yang menyatakan bahwa Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Pasal 39 ayat (1) yang menyatakan bahwa Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Pemeriksa yang



bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan, dan ayat (2) huruf n menyatakan antara lain bahwa Instansi Pembina mempunyai tugas. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa. Sementara itu pada Pasal 40 ayat (1) menyatakan bahwa Jabatan Fungsional Pemeriksa wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi. Selain itu, Permenpan RB Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional PNS Pasal 1 angka 25 yang menyatakan bahwa Organisasi Profesi adalah organisasi yang diakui dan ditetapkan oleh Instansi Pembina untuk pengembangan profesionalisme dan pembinaan kode etik serta kode perilaku profesi Jabatan Fungsional. Hal tersebut dalam rangka mewujudkan pemeriksa yang memiliki kompetensi profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan secara independen, objektif, dan profesional.



## Penyerahan LHP Kinerja dan PDDT

PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
KINERJA DAN PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU SEMESTER II 2020  
BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG  
Bandar Lampung, 22 Desember 2020



**B**adan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung menyerahkan LHP atas Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu semester II 2020 di ruang auditorium lantai 3 (22/12). LHP yang diserahkan yaitu Pemeriksaan Kinerja atas Efektifitas Penanganan Pandemi Covid-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Provinsi Lampung, Pemeriksaan Kinerja atas Efektifitas Upaya Pencegahan dan Pengendalian Dampak Kesehatan Pandemi Covid-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesisir Barat, Pemeriksaan Kinerja atas Efektifitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Tahun Anggaran 2019 s.d 2020 (Semester I) pada Pemerintah Kota Metro dan Kabupaten Pesawaran, Pemeriksaan Kepatuhan atas Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Provinsi Lampung dan Kota Bandar Lampung, Pemeriksaan Kepatuhan atas Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, serta Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Terkait Infrastruktur Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah

Kabupaten Lampung Barat dan Tanggamus.

Penyerahan LHP dilakukan secara virtual conference sehubungan dengan situasi Pandemi COVID-19 oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Andri Yogama. Penyerahan LHP juga dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung, Mingrum Gumay dan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto serta para Kepala Daerah dan Ketua Dewan atau yang mewakilinya. Sebelum LHP diserahkan, BPK telah meminta tanggapan kepada para Pemerintah Provinsi/Kab/Kota atas Konsep Hasil Pemeriksaan BPK, termasuk rencana aksi yang akan dilaksanakan. Dengan demikian, diharapkan rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti dengan baik sehingga tata kelola keuangan menjadi lebih akuntabel.

Ketua DPRD Provinsi Lampung menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas pemeriksaan yang telah dilaksanakan. Sementara Sekretaris Daerah mewakili Gubernur Lampung menyatakan siap untuk menindaklanjuti paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah hasil pemeriksaan diterima.

## Kunjungan Kerja Komite IV DPD RI

**A**nggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (8/12) Abdul Hakim beserta rombongan melakukan kunjungan kerja ke BPK Perwakilan Provinsi Lampung dan diterima oleh Kepala Perwakilan Andri Yogama didampingi para pejabat struktural.

Kunjungan kerja Komite IV DPD RI dimaksudkan untuk memperoleh informasi terkait hasil pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2020 yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah baik pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja maupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDDT). Dalam kesempatan tersebut, Komite IV DPD RI menyampaikan beberapa pertanyaan terkait hasil pemeriksaan oleh BPK Perwakilan Provinsi Lampung.

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Lampung Andri Yogama menjelaskan bahwa dari 16 pemda, terdapat 14 pemda yang memperoleh opini WTP dan 2 pemda yang memperoleh opini WDP. Pemeriksaan atas laporan keuangan merupakan pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan opini atas



kejelasan penyajian laporan keuangan, BPK juga melihat penerapan Sistem Pengendalian Intern dan kepatuhan pemda terhadap peraturan perundang-undangan, sehingga aspek tata kelola keuangan sudah tercakup dalam pemeriksaan atas laporan keuangan.

Rekomendasi diberikan sesuai dengan penyebab terjadinya permasalahan dan lebih spesifik supaya mempermudah pemda memahami untuk menindaklanjuti dalam rangka memperbaiki pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Lampung meningkatkan komunikasi dengan Pemerintah Daerah melalui pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan secara periodik.



SAI BATIN



PEPADUN



## PAKAIAN ADAT PEPADUN SAI BATIN

Masyarakat Lampung terbagi menjadi dua adat, yaitu adat Lampung Pepadun dan Sai Batin. Umumnya, masyarakat Lampung Pepadun tinggal di daerah daratan sedangkan masyarakat Sai Batin tinggal di daerah pesisir.

### Pakaian Adat Pepadun

Pakem pakaian pengantin adat Lampung Pepadun identik warna putih. Kemudian pada aksesoris kepala, mempelai wanita memakai siger yang memiliki sembilan lekukan. Sedangkan laki-laki memakai kopiah emas.

Dari segi pakaian, mempelai wanita mengenakan kebaya berwarna putih dan bawahannya mengenakan sarung tapis yang di bagian bawahnya terdapat rumbai-rumbai koin atau disebut rumbai ringgit. Sedangkan mempelai laki-laki mengenakan kemeja putih, celana panjang berwarna putih dan mengenakan sarung tumpal dengan kain selempang jungsarat. Kedua kain ini sejenis dengan kain songket. Untuk alas kaki kedua mempelai mengenakan sandal selop tutup.

Selain itu, kedua mempelai mengenakan aksesoris di tangan berupa gelang burung, gelang kano, gelang duri dan gelang bibit. Sedangkan aksesoris kalung yaitu kalung inuh, buluh, papan jajar dan buah jukum. Pengantin juga mengenakan ikat pinggang serratei. Mempelai pria juga membawa keris punduk, kemudian keduanya membawa buah manggis.

Siger adat Pepadun memiliki sembilan lekukan menandakan ada sembilan marga yang bersatu sehingga

disebut lekuk siwa atau siwo. Lekukan tersebut memiliki ukiran salur.

### Pakaian Adat Sai Batin

Pakaian adat Lampung Sai Batin identik dengan warna merah dan emas. Kemudian hiasan kepala mempelai wanita memakai siger yang berjumlah tujuh lekukan. Sedangkan mempelai pria memakai kopiah tungkus atau tukkus. Bahan baju kedua mempelai terbuat dari kain bludru yang memiliki motif floral bunga tabur, salur, atau pucuk rebung.

Selebihnya untuk aksesoris tangan juga mengenakan gelang burung, dan gelang kana. Kalung biasanya memakai kalung papan jajar, kalung buah jukum bangkang, kalung gajah minung atau selembok. Selanjutnya memakai ikat pinggang pending emas atau disebut juga bubinting.

Pada Lampung Pepadun mempelai wanita tidak memakai selempang jungsarat. Sedangkan pada Lampung Sai Batin kedua mempelai memakai satu buah selempang jungsarat yaitu selempang sejenis dengan songket yang diselempangkan dari bahu kanan ke pinggang kiri.

Siger adat Sai Batin memiliki tujuh lekuk dengan hiasan batang di setiap lekukannya. Tujuh lekuk tersebut menandakan ada tujuh adok atau gelar pada masyarakat pesisir, yaitu Suttan atau dalom, raja jukuan atau dipati, batin, radin, minak, kimas dan mas atau inton.







# GALERI FOTO

## Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan



Pelepasan Pegawai Mutasi ▼

Pembentukan IPKN via Media Daring ▼



Pembukaan HUT BPK RI ▼

Kegiatan Memasak Dharma Wanita ▼







# DIRGAHAYU BPK RI

## Selamat Natal dan Tahun Baru 2021

### Tim Redaksi

Penanggungjawab  
Hari Wiwoho

Pengarah Teknis  
Yayat Rahadiyat

Redaktur  
Teguh Srihasto

Editor  
Desesri Ralifia

Layout dan Desain  
Ogan Dinahan

Layout dan Desain  
Topan Santoso

Fotografer  
Josep Ade



BPK Perwakilan  
Provinsi Lampung

PUSAT INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Jalan Pangeran Emir M. Noor No. 11 B Teluk Betung Utara  
Bandar Lampung 35215 Telp. (0721) 474828 Fax. (0721) 472872  
[www.lampung.bpk.go.id](http://www.lampung.bpk.go.id)